EKUMENE DI PAPUA

Konstantinus Bahang

***Abstract*:** In Papua live more than 50 Christian denominations of Catholics, Reformed, Calvinist, Baptists, Evangelical, Pentecostal denominations, and Adventists of Seventh Day. In a going-on hibrid sosiety affected by globalism and expansive developments ecumenical movement is a must. However, in Papua this ecumenical movement looks fragile as most chucrches have just been going out of their tribal or regional churches since they found themselves in front of social problems. This movement needs to be founded on solid theology of ecumenism and appropriate skills of cultivating diversity in its orientation to universal humanity.

***Keywords*:** ekumene • Papua • misi • *zending* • PGGP •

Ada suatu kebanggaan ketika pemimpin agama Kristen di Papua menyebut Papua Tanah Injil. Sekurang-kurangnya pada Hari Pekabaran Injil di Papua yang ke-161 dan ke 162, para pemimpin Gereja dan denominasi Protestan dengan bangga menciptakan slogan yang mengungkapkan bahwa orang Kristen merupakan penganut mayoritas di Papua dan telah ikut mengantar masyarakat Papua menuju peradaban yang makin meningkat. Mereka sadar bahwa selain pesisir barat Papua yang sudah berada di bawah pengaruh Islam, wilayah Papua bagian tengah dan timur berutang budi pada penyebar Injil dari Gereja Kristen. Sejak 1855, ketika Otto dan Geissler menginjakkan kakinya di Pulau Mansinam, masyarakat Papua secara bertahap diinjili oleh pelbagai aliran Kristen baik di pantai maupun di pedalaman, dari aliran Persekutuan Gereja Indonesia, Katolik, Advent, kelompok aliran Pentakosta dan para Evangelis.

Kebanggaan itu masih menyisakan duri dalam hati. Sejarah penyebaran Injil di Papua ditandai dengan pembagian wilayah dan perebutan anggota oleh denominasi. Gerakan itu memuat arus persaingan, meneruskan suasana yang ada di daerah asal kekristenan. Sadar akan ancaman perpecahan dan persaingan itu, sudah banyak usaha melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Papua untuk mulai bekerja dan berjalan bersama. Gerakan ekumenis ini bukan jalan yang mudah dilalui, walaupun semua orang merindukannya.

Mikhael Root, dosen tetap Teologi Sistematik di Catholic University of America, memberikan kesaksian kontras tentang gerakan ekumenis sekarang ini. Di satu pihak, ia menyaksikan bahwa awam, bahkan para pastor dan pendeta, menganggap bahwa perbedaan antara aliran-aliran besar Protestan tidak relevan lagi. Orang gampang saja berpindah dari Gereja yang satu ke yang lain bila pindah ke kota baru. Perkawinan campur antardenominasi tak lagi dianggap cacat. Ia mengutip studi *Pew Research Center study* tahun 2017 bahwa lebih dari setengah orang Protestan dan Katolik di Amerika Serikat percaya bahwa Katolik dan Protestan lebih banyak samanya daripada bedanya. Di pihak lain, ia menyaksikan juga bahwa antusiasme ekumenis sekarang berkurang bahkan sampai pada musim dingin, *a time of ecumenical stagnation*, karena semakin kelihatan perbedaan ajaran iman dan ajaran moralnya (Root, 2018).

Bagaimana gerakan ekumenis ini terjadi di Papua? Kami mengangkat tulisan ini untuk menjawab pertanyaan itu dengan menggambarkan keragaman kekristenan di Papua dan usaha-usaha ekumenis yang sudah dilakukan. Sejauh mana keragaman itu nyata dalam penyebaran dan kehidupan bersama di pelbagai wilayah Papua? Dalam proses keluar dari *getho* dan dari denominasi yang melekat dengan suku dan wilayah tertentu, bagaimana usaha, peluang dan tantangan gerakan ekumenis ketika gerakan pembauran tak bisa dihindari lagi di era globalisasi sekarang ini?

Misi Awal dan Penyebaran Orang Kristen di Papua

Sebelum mengulas gerakan ekumene di Papua, baiklah dipahami dulu situasi keragaman aliran Kristen di Papua. Keragaman Gereja dan denominasi Kristen di Papua akan kelihatan dari peta penyebaran aliran-aliran Kristen ke pelbagai wilayah di Papua. Papua mengenal kekristenan ketika kekristenan sudah ditandai dengan keragaman aliran di daerah asalnya di Belanda, Jerman dan Amerika Serikat. Menurut data sejarah, kekristenan di Papua dimulai sejak tahun 1855 ketika C.W. Ottow dan J.G. Geissler tiba di Pulau Mansinam (Saud, 2016). Usaha mereka tidak membawa hasil yang besar karena penduduk tidak langsung menerimanya. Banyak kebiasaan masyarakat yang sangat berlawanan dengan pewartaan Injil. Pada 1863 mereka dibantu oleh utusan *zending UZV*. Walaupun demikian usaha pekhabaran Injil belum beranjak jauh dari Mansinam dan sekitarnya. Dalam 25 tahun hanya 20 orang Irian yang menerima baptisan setelah dilayani oleh lebih dari 17 *zendeling*. Setelah 50 tahun, pada 1907 jumlah mereka baru mencapai 150 orang (van den End dan Weitjens, 1993). Penyebaran Injil ada di bawah badan pekhabaran Injil UZV. Mereka kemudian menyebar ke

Biak, Numfor, dan ke daerah Kepala Burung. Pada 1938 *zending* UZV sudah terbagi dalam 10 *resort*. Dari sini mereka membentuk Konferensi para *Zendeling* yang menjadi badan pekhabaran Injil bersama dan yang mengantar pada kemandirian Gereja di Irian. Bersamaan dengan kekurangan zendeling Belanda karena dibunuh atau diusir Jepang, dibentuklah Gereja Kristen Irian Jaya (GKI-Irja) pada tahun 1956. Hampir semua jemaat hasil pewartaan dari UZV masuk dalam jemaat GKI. Mereka tersebar di Papua bagian Utara dan Barat.

Sampai tahun 1956, GKI tak melakukan penginjilan ke pedalaman. Awalnya kehadiran GKI di Balim dimulai pada Desember 1956 oleh pegawai pemerintahan, tetapi jemaat ini kemudian berkembang mendirikan Gereja dan jemaat sendiri, mulai dari Wesaput, Wamena, Kurima, Wesema, dan Hom-hom (Alua, 2006: 23).

Pewartaan Injil kemudian merambah daerah pedalaman Papua. Setelah Lembaga Pekhabaran Injil *The Christian and Missionary Alliance* (CAMA) dibentuk tahun 1887 di New York oleh A.B. Simpson, seorang penganut Gereja Kingmi, Papua New Guinea dan Irian Jaya menjadi salah satu sasaran penginjilan selain Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi (Tebay, 2010: 33). Pada 1937 R.A. Jaffray meminta ijin dari pemerintah Hindia Belanda untuk memulai penginjilan di pedalaman Papua, khususnya setelah ditemukan Danau Wissel, Paniai, tahun 1936. Penginjilan yang berbasis di Makasar itu masuk melalui pantai selatan, Pantai Uta, menuju Danau Wissel di Paniai, dan akhirnya membangun basis di Enarotali pada 13 Januari 1939. Dibantu oleh misionaris dari Kalimantan dan siswa-siswa sekolah Alkitab di Makasar, Gereja Kingmi mulai menyebar ke seluruh wilayah Paniai, ke arah selatan menuju daerah Deiyai, kemudian daerah Barat ke wilayah Lembah Kamu dan Mapia, ke utara menuju Nabire dan ke Timur menuju daerah Moni. Pesatnya perkembangan Penginjilan juga didukung oleh sekolah Alkitab yang dibangun di Enarotali. Perkembangan penyebaran Injil bahkan menjangkau sampai wilayah pesisir. Pada 1952 sudah dibangun Pusat Penginjilan baru di Sentani dan kemudian di Jayapura (1962) dan Abepura (1965) karena dirasa perlu untuk memiliki kantor pusat di ibukota provinsi di Holandia (Jayapura) (Tebay, 2010). Dari sini Kingmi menyebar ke wilayah lain, seperti di Merauke, Sarmi, Biak, Serui Waropen, Manokwari, Sorong, Fak-fak, dan Kaimana.

Ketika Lembah Baliem ditemukan melalui ekspedisi Archbold 1938-1939 dan kecelakaan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat tahun 1945, para misionaris CAMA dan Katolik segera menyiapkan pembukaan wilayah penginjilan di Lembah Balim. Tahun 1952 *Zending* CAMA mencoba masuk melalui darat dari Enarotali tetapi kemudian memutuskan untuk memasuki

Lembah ini dari Sentani melalui udara dengan menggunakan pesawat amfibi yang mendarat di kali Balim. CAMA berhasil masuk tanggal 20 April 1954. Dengan membangun basis di Hitigima, mereka kemudian menyebar ke kampung-kampung di Lembah Balim, ke Ilaga, Piramid, Tulem, Wosi, Pugima, Ibele, Sinak dan Sinakma. Penginjilan didukung oleh Sekolah Kesaksian *(Witness School)* di pelbagai daerah dan Sekolah Alkitab di Piramyd (Alua, 2006; Tebay, 2010).

Kehadiran para Evangelist di Papua ditandai dengan kehadiran badan *zending* APCM *(Asian Pacific Christian Mission)* yang terdiri dari utusan UFM *(Unevangelized Field Mission)*, RBMU *(Regions Beyond Missionary Union)* yang beraliran GIDI dan ABMS *(Australian Baptist Mission Society)* yang beraliran Baptis. Sepuluh bulan kemudian, ketika CAMA sudah hadir di Lembah Balim, badan *zending* ini menyusul ke sana (Hayward, 1980). Di Wamena dibuat kesepakatan di antara kelompok-kelompok *zending* bahwa CAMA akan melayani lembah Balim dan Ilaga, ABMS di wilayah hulu Sungai Balim (Tiom, Maghi, dan Pireme), APCM di utara lembah, yaitu hulu Sungai Hablifloerie, yang kemudian secara khusus berkarya di Bokondini, Kelila, Iluga dan Wolo dan wilayah KOMA UFCM di wilayah JAMO (Ilu dan Mulia); RBMU di wilayah *Swart Valley*: Karubaga, dan kemudian ke Kanggime, Mamit, Wurineri, Wumage, Goya, dan Kutime) (Alua, 2006).

Gereja Pentakosta di Papua bermula dari usaha penginjilan keluarga Jonathan Itaar di Sorong tahun 1948 (Karubaba, 2018). Sudah sejak 1921 Gereja Pentakosta berada di Indonesia. Mereka mengawali karyanya di Bali, kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Jonathan Itaar adalah orang asli Papua di Tobati yang mengenal Gereja Pentakosta ketika mengikuti majikannya di Ternate. Setelah ia dibaptis, ia mengikuti sekolah Alkitab di Surabaya, kemudian menjadi gembala di Manado, sebelum diutus ke Sorong. Di Sorong (Doom) ia bergabung dengan beberapa keluarga yang memintanya datang ke sana. Dari Sorong, bersama dengan gembala Jacob Merauje dari Ternate dan FG van Gessel dari Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Surabaya, ia datang ke Hollandia (Jayapura). Dari sana, semangat Pentakosta ini menyebar ke Biak, Serui, Yapen, Waropen, Manokwari. Setelah cukup lama berkembang, pada 1955 dibentuklah Badan Penghubung *Pinkster Gemeente* di Jayapura, yang pada tahun 1956 ditambah dengan nama *Bethelkerk* oleh FG van Gessel secara sepihak. Dalam badan ini bergabung Bethel Injil Sepenuh, *Pinkster Gemente*, Bethel, Tabernakel Bethel *Zending*, dan lain-lain. Pada 1982, badan ini melebur ke dalam *Pinksterkerk in Indie* (sekarang GPdI) di Jakarta, kecuali Gereja Bethel Gereja Pentakosta

(GBGP). Dalam Mubes XVII tahun 2018, Gereja Bethel Gereja Pentakosta sudah berkembang menjadi 18 Klasis dari 380 jemaat.

Misi Katolik mulai berkembang secara aktif di Papua ketika dibentuk satu Prefektur Apostolik Nieuw Guinea Belanda yang berpusat di Langgur tahun 1888 (Berg, 1974). Penyelidikan daerah misi di Papua langsung dilakukan sesudahnya. Dari Langgur, tahun 1905 dibangun pos misi di Merauke. Pengembangan misi ke Merauke melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh imam C. le Cocq d'Armandville di Fakfak tahun 1894 yang tak lama kemudian berlayar ke Mimika. Penyebaran misi kemudian mengarah ke daerah Kepala Burung, Babo, Bintuni, Manokwari, dan Sorong, dengan berusaha mendirikan sekolah bersama guru-guru dari Kei. Penyebaran ini kemudian dibatasi oleh pembagian wilayah misi dan *zending* oleh pemerintah Belanda. Setelah ada tawar-menawar dengan pemerintah Belanda, misi juga bergerak ke wilayah Utara, yang pada saat yang sama *zending* Protestan bergerak ke Fakfak dan Mimika, walaupun tak bertahan lama. Misi Katolik selain bergerak sendiri ke wilayah Selatan, mulai juga menjajagi wilayah Utara, baik karena permintaan suku tertentu maupun untuk melayani pegawai (Indo-) Belanda yang beragama Katolik. Setelah tidak ada lagi pembatasan wilayah *zending* dan misi, Gerakan misi ini kemudian menyabur jauh ke Timur menuju Hollandia (Jayapura), melalui Kerom, baik untuk melayani pegawai Belanda yang beragama Katolik (terutama ketika kedatangan pegawai atau usahawan Indo-Belanda dari Indonesia setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia tahun 1950) maupun untuk membuka misi baru. Dari wilayah Mimika kemudian misi menerobos ke pedalaman Papua di daerah tiga danau, yakni Paniai, baik melalui darat melalui sungai Uta maupun melalui udara dari Biak, menyusul apa yang dibuat oleh misionaris CAMA. Dengan demikian, baik di Paniai maupun di wilayah utara terdapat *zending* berganda (*dubble zending*).

Gereja Advent Hari Ketujuh pertama kali masuk di Papua pada 1 Desember 1948 di Sorong (Umbora, 2016). Dari Sorong para misionaris bergerak ke Jayapura (1949) dan mendirikan kantor Sinode di Argapura (1950) dan sekolah penginjilan di Jayapura (1953) yang pada tahun 1957 dipindahkan ke Doyo Baru. Dari sini, Gereja Advent berkembang ke Waropen, Manokwari, Mamberano. Dengan pembukaan penerbangan Advent tahun 1970 misi kemudian berkembang ke Wamena (1970), Nabire, Sarmi, Serui, Timika (1985) dan Biak dengan pembukaan sekolah di setiap wilayah itu. Sampai tahun 2016 di Papua sudah terdapat 35 wilayah dengan 155 Gereja induk.

Ketika aturan *zending* tak lagi berlaku, Gereja-gereja menyebar ke segala arah dan memasuki wilayah yang secara tradisional didominasi Gereja

tertentu. Di mana-mana ditemukan apa yang pada masa lampau disebut '*zending* ganda'. Memang secara tradisional wilayah-wilayah tertentu memperlihatkan dominasi Gereja tertentu. Di wilayah selatan, Gereja Katolik menjadi Gereja mayoritas. Adapun, di utara awalnya menjadi basis GKI, kemudian Advent dan Pantekosta, khususnya di wilayah perkotaan. Di wilayah pegunungan tengah, umat terbagi dalam tiga aliran besar: Tolikara dan sekitarnya menjadi pusat GIDI, Thiom dan sekitarnya untuk Gereja Baptis, Paniai dan Lembah Baliem untuk Gereja Kingmi. Dengan penyebaran lintas batas oleh Gereja tertentu dan didukung oleh perpindahan umat ke wilayah lain, wilayah yang secara tradisional menjadi wilayah Gereja tertentu juga sudah dihuni oleh umat Gereja lain. Sekarang, di seluruh Papua tersebar 44 Gereja dan denominasi yang bergabung dalam 5 kelompok aliran besar: Persekutuan Gereja Lembaga Injili di Indonesia (PGLII) wilayah Papua (10 Gereja), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) wilayah Papua (13 Gereja), Katolik (5 keuskupan), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Wilayah Papua (19 badan dan sinode), dan Sinode Gereja Advent Hari Ketujuh. Kehidupan agama Kristen yang sebelumnya ditandai dengan penghayatan satu agama tertentu sekarang menjadi beragam. Hal ini menuntut sikap ekumenis yang dewasa dan matang.

Ekumene dan Usaha-Usaha Ekumenis di Papua

Penyebaran Injil di Indonesia terjadi ketika di Eropa sudah terjadi perpecahan dalam Gereja Kristen. Setelah Reformasi Protestan, masyarakat Eropa terpolarisasi menurut aliran. Eropa bagian utara hampir semuanya mengikuti aliran Reformasi, sedangkan bagian selatan tetap menganut Katolik. Misi Kristen di Indonesia dimulai pada abad 16 oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang Katolik, tetapi pada awal abad 17, Belanda yang Calvinis datang sebagai Kongsi Dagang (VOC) baik untuk berdagang maupun untuk menyebarkan Injil menurut paham Reformasi Kalvinis. VOC diikat dengan perjanjian untuk menegakkan Reformasi dan menobatkan semua 'penyembah berhala', 'agama palsu' -orang yang sudah Katolik- menjadi penganut Protestan, agama negara di Belanda (Aritonang, 2005). Ketika penyebaran Injil berkembang di Papua suasana hubungan antara Katolik dan Kristen Protestan sudah agak berubah. Pemerintah Belanda sudah memberi peluang bagi Gereja Katolik untuk menyebarkan Injil ke seluruh daerah di Indonesia yang masih beragama suku, bukan di daerah yang sudah beragama Islam. Wilayah *zending* dan misi diatur oleh pemerintah Belanda baik demi "ketertiban dan keamanan" maupun demi melayani kepentingan pemerintah (van den End dan Weitjens, 1993).

Dalam situasi ini sulit dibayangkan ada gerakan ekumenis. Kedua Gereja masih membawa perpecahan di Eropa dan Belanda, dan para misionaris Katolik sendiri belum dibekali semangat dan paham ekumenis yang baru muncul pada Konsili Vatikan II tahun 1965.

Di samping itu, sampai akhir abad 18 Gereja Protestan di Hindia Belanda hanya satu, yaitu Gereja Protestan negeri Belanda Gereformeerd atau Hervormd, yang kemudian banyak bergabung dalam GPI (Gereja Protestan Indonesia). Baru tahun 1815, ketika di Hindia Belanda pintu dibuka bagi Badan Pekhabaran Injil (*Zending*), muncul Gereja lain sebagai hasil pewartaannya, terlebih di daerah Kalimantan. Sebutan "gerakan ekumenis" lebih berkaitan dengan kesatuan Gereja-gereja dalam lingkungan GPI, atau kesatuan antara GPI dengan Gereja-gereja hasil *zending* yang tak mau bergabung dengan GPI, atau persekutuan antara Gereja-gereja hasil *zending* (van den End dan Weitjens, 1993).

Ketika pekhabaran Injil dimulai di Papua, ekumene antar-Gereja tampak dalam kerja sama para *zendeling* dalam badan pekhabaran Injil, atau antar-*zending*, walaupun harus diakui bahwa hal itu tidak muncul dari suatu gerakan yang terencana untuk bersatu. Hal ini bisa dimengerti karena gerakan ekumene baru dimulai tahun 1910 di Edinburg. Perhatian utama *zending* bukan pembentukan Gereja sendiri melainkan pewartaan Injil dan pertobatan orang menjadi Kristen. Demi tujuan bersama ini kadang mereka tergabung dalam satu badan pewartaan Injil (*zending*) para *zendeling* dari pelbagai aliran. Otto dan Geissler, dua misionaris pertama di Papua, berasal dari kerja sama antara Gossner yang beraliran pietisme di Jerman dengan Heldring di Belanda. Hal yang menyatukan mereka ialah kesamaan motivasi untuk mengabarkan Injil ke dunia yang belum mengenal Injil, dengan bekerja, bertukang, dan usaha sosial lainnya, tanpa harus lebih dahulu menjadi tenaga "profesional" di bidang penginjilan (Latuputy, 2017) Setelah mereka tidak bisa melanjutkan karya mereka, apa yang mereka sudah rintis diserahkan kepada lembaga *zending* UZV (Perhimpunan *zending* Utrecht) yang beraliran 'etis' (van den End dan Weitjens, 1993).

Hal serupa terjadi pada masa misi pertama Katolik di Kepala Burung. Pater van der Heyden membawa bruder Yesuit, Zinken dan Te Broekhorst, bersama dengan seorang guru Protestan dari Ambon, Christianus Pellatimu, untuk mengurus sekolah di Kapaur, di timur Fakfak, pada 1896. Setelah sekolah ini ditutup, bruder-bruder ini dan Bapak C. Pellatimu dipindahkan ke Kei untuk mengurus sekolah di sana. Dari sana muncul banyak guru yang kemudian membantu penyebaran Injil di Papua melalui sekolah (Berg, 1974).

Suasana ekumenis sesudahnya tidak begitu kentara. Relasi antara Katolik dan Protestan belum begitu cair karena belum ada gerakan ekumenis di kedua Gereja itu. Keduanya bahkan tampil di daerah misi Papua dengan membawa ketegangan dari daerah asalnya. Mereka berlomba-lomba dalam merebut wilayah pelayanan. Hal ini menyebabkan pemerindah Hindia Belanda harus menetapkan garis batas misi dan *zending* pada garis lintang selatan 4º 50. *Zending* Protestan berkarya di bagian utara garis itu sedangkan misi Katolik di wilayah selatan. Selanjutnya, tidak terdapat gerakan ekumenis yang mencolok karena belum ada Gereja selain badan *zending*. Masing-masing jemaat ada di bawah *zendeling* tertentu. Usaha 'ekumenis' mungkin bisa dialamatkan pada usaha penyatuan para *zendeling* dalam satu Konferensi para *zendeling* UZV (van den End dan Weitjens, 1993) atau kerja sama UZV dengan Gereja di Maluku, Sangihe dan Minahasa, So'e, dan Depok, dalam rangka pengadaan guru sekolah di Papua dan kemudian tahun 1950 dengan *zending* Menonit (DZV) di Kepala Burung, sampai terbentuknya GKI di Tanah Papua tahun 1956 (Latuputy, 2017).

Keadaan mulai berubah setelah tahun 1950. Sekitar pertengahan abad 20 di Papua muncul badan pekhabaran Injil baru. Badan Pekhabaran Injil Amerika, CAMA, yang sudah berada di Makasar mulai mengembang-kan diri di Papua. Demikian juga UFM, ABFM dan RBMU dari Australia dan Amerika menambah spirit baru dalam penginjilan, khususnya untuk daerah pedalaman yang belum dijangkau oleh Katolik dan GKI. Wilayah pedalaman dilihat sebagai daerah rebutan bagi misi, *zending*, dan badan pekhabaran Injil yang baru, dengan cara yang tak sehat. Walaupun demikian, pada mereka masih terdapat komunikasi dan kompromi yang mengatakan bahwa para misionaris, *zendeling* dan *evangelist* tak menyebarkan Injil di daerah yang sudah ada Gereja dan Badan Pekhabaran Injil, kecuali kalau orang setempat yang meminta.

Kenyataan bahwa UFM, ABFM dan RBMU kemudian tidak menyebarkan Injil di Lembah Baliem -yang sudah ditempati Misi Katolik dan CAMA- tetapi menyebar ke Tolikara, Thiom, dan Puncak Jaya, memperlihatkan saling pengertian antara badan-badan penginjilan itu. Barangkali suasana ekumenis hanya sampai di situ, karena selanjutnya wilayah-wilayah yang sudah dimasuki badan penginjil tertentu langsung tertutup bagi yang lain. Kerja sama hanya kelihatan pada relasi pribadi para misionaris karena kesukuan atau karena nasib yang sama di wilayah tertentu. Sejauh demikian, terdapat *sharing* dan saling membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana, khususnya penyewaan pesawat. Semangat ekumenis di lingkungan Protestan yang sudah dimulai tahun 1910 di Edinburg dan

pertemuan ekumenis lain sesudahnya belum berakibat banyak di daerah misi. Memang, sebelum Konsili Vatikan II Gereja Katolik tak mengikuti sidang-sidang ekumenis itu. Hanya perlu dicatat bahwa dalam situasi demikian usaha ekumenis masih bisa dilakukan di bidang persekolahan. Pada 1957, para misionaris Katolik di Jayapura mengajak *zendeling* GKI yang baru satu tahun didirikan untuk menyelenggarakan Sekolah Gabungan. Sekolah ini masih berjalan sampai sekarang dan dijalankan secara ekumenis.

Suasana baru muncul dalam lingkungan Gereja Katolik. Konsili Vatikan II (1962-1965) melalui dokumen ekumenisnya *Unitatis Reintegratio* mendorong kerja sama dengan Gereja Protestan. Dalam orientasi itu, pada 1969 Uskup Staverman OFM bersama Pendeta F.J.S. Rumainum sudah menggagas ekumene di Papua. Antara Gereja Kristen Maluku (GKM), GKI, dan Katolik dibuat kesepakatan tentang pembaptisan. Para pastor dan pendeta GKI sepakat melakukan program 'tukar mimbar' (Desa, 2019). Pada 1982, sekretaris sinode GKI sudah mengajak Gereja Katolik (Uskup Herman, OFM) untuk mengadakan Sekolah Pendidikan Guru di Biak. Pihak Katolik setuju dan menyiapkan gambarnya. Sayangnya, rencana ini urung dilakukan karena GKI sanggup melakukannya sendiri.[1] Pada dekade 1980-an sudah dirayakan Pekan Doa Sedunia pada bulan Januari. Kerja sama antara GKI dan Katolik terus dijaga sehingga peringatan hari Reformasi Gereja sedunia tahun 1985 dirayakan secara ekumenis di Katedral "Kristus Raja" Dok V Jayapura (Mawene, 2017). Selain itu, dalam menanggapi inisiatif dari seorang dokter berkebangsaan Belanda untuk memberi pelayanan kesehatan di pedalaman, GKI menggandeng Katolik untuk mengembangkan yayasan kesehatan Bethesda di Wamena. Pdt. Herman Saud, wakil GKI, selalu mengutamakan kesatuan dan kebersamaan daripada kerja sendiri (Saud, 2019).

Kerja sama Katolik dan GKI mulai dikembangkan secara intensif ketika tahun 1995 Mgr. Herman Munninghof mengangkat masalah HAM di Timika. Ia mengajak GKI untuk bersama-sama menghadap pihak militer. Selain itu, kebangunan rohani yang diadakan oleh Gereja Baptis dihadiri juga oleh Uskup Leo dan Pdt. Herman. Selanjutnya, Gereja Baptis bergabung dalam kelompok diskusi ini. Ajakan ini disambut dengan gembira oleh GKI. Kerja sama ini kemudian semakin sering dilakukan ketika tokoh agama di Papua harus mengambil sikap atas kejadian di Sitobondo,

[1]Wawancara dengan Pdt. Herman Saud, Abepura, 8 Maret 2019. Pdt. Herman Saud adalah Ketua PGI Wilayah Papua. Ia pernah menjabat Ketua STT GKI I.S. Kijne dan Ketua Sinode GKI selama dua periode. Pada masa kepemimpinannya, ia sangat terlibat dalam usaha ekumenis bersama Gereja Katolik, serta menjadi penggagas dan pendiri PGGP.

Surabaya, dan Sambas, tahun 1997, bersama umat muslim dan Pangdam Cenderawasih. Uskup Herman, Uskup Leo, dan Bpk. Hardus Desa selalu bertemu tiap Jumat kedua bersama Pdt. Herman Saud dan wakil-wakil GKI. Ketika masalah penyanderaan di Mapunduma dijadikan isu bersama tahun 1997, Pdt. Benny Giyai dari Kingmi meminta dukungan GKI, sehingga ia juga bergabung dalam kelompok ini. Isak Ondoami bersama Theo van den Broek diutus untuk bernegosiasi dengan pihak penyandera dengan biaya dari GKI dan Katolik. Dalam salah satu Kebangunan Rohani yang dilakukan oleh GPdI (Pentakosta) yang mengundang kelompok ini, GPdI juga mulai terlibat dalam pertemuan pemimpin agama Kristen.

Dari sini mulai muncul ide untuk membentuk lembaga ekumenis Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP). Masalah Papua yang semakin rumit tahun 2000 menantang Gereja-gereja untuk bersatu. Pada 2001, ketika masalah kematian Theys Eluai meresahkan masyarakat, Gereja GIDI mengundang pemimpin agama dalam satu kebangunan rohani. Sejak itu, dipikirkan secara serius persekutuan Gereja-gereja di Papua. Akhirnya, pada 20 Mei 2002 dibentuklah Persekutuan Gereja-Gereja di Papua yang terbagi dalam empat rumpun aliran, yaitu Gereja-Gereja yang bergabung dalam PGI, Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia Wilayah Papua, dan Gereja Katolik. Pada awalnya, mereka adalah persekutuan para ketua sinode, tetapi kemudian wakil di PGGP tidak melekat dengan ketua sinode agar PGGP tidak selalu dirombak hanya karena penggantian ketua sinode. Gereja Advent Hari Ketujuh kemudian ikut bergabung sebagai peninjau.

PGGP adalah wadah antar-Gereja-gereja untuk bersekutu, berdialog, berkomunikasi, berkonsultasi, bermusyawarah, dan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan karya pelayanan pastoral Gereja di bidang sosial, kemanusiaan, dan kerohanian (PGGP, 2015). Sejak awal, PGGP membentuk badan konsultasi dan membantu pembentukan lembaga advokasi seperti ELSAM, FORERI, dan YPMD. Sejak terbentuknya PGGP tahun 2002, hari masuknya Injil ke Papua tanggal 5 Februari, yang selama ini hanya diperingatan oleh GKI, dirayakan bersama secara ekumenis. Selain karena pada 5 Februari 1855 bukan awal masuknya GKI melainkan *zending* yang tidak di bawah Gereja tertentu, perayaan 5 Februari dijadikan pesta ekumenis untuk semua Gereja. Lima Februari dirayakan sebagai Injil masuk Papua, bukan awal berdirinya GKI di Papua. Pada awalnya, hari itu hendak dirayakan sebagai Hari Damai Papua, tetapi kemudian berubah menjadi Hari Pekhabaran Injil di Papua. Pada 2005, PGGP merumuskan program kerja di bidang sosial kemasyarakatan dengan judul *Papua Tanah Damai,* yang

kemudian dijadikan acuan pemimpin agama-agama di Papua (PGGP, 2005).

Dari perjumpaan dan kerja sama ini kemudian dikembangkan wadah dan bentuk kerja sama ekumenis lain, yang kadang kala meneruskan apa yang ada secara nasional, seperti Asosiasi Pendeta Indonesia di Papua (API), Persatuan Intelektual Kristen (PIKI), kerja sama antar-Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Gereja-Gereja, Forum Kerjasama dan Dialog antar-Sekolah Tinggi Teologi di Tanah Papua (FORDIK), Gabungan Muda-mudi Kristen (GMK), dan inisiatif lain menurut bidang kerja seperti para pilot, para dokter, dan sebagainya.

Suatu Gerakan yang Sedang Belajar Melangkah

Gerakan ekumene yang sedang berkembang di Papua menarik untuk disimak. Secara konkrit Gerakan ekumene di Papua berlangsung antara Gereja Katolik, Gereja-gereja yang ada di bawah PGI yang umumnya beraliran Kalvinis dari Belanda, Gereja Evangelist dari Amerika dan Australia, Gereja Kingmi Amerika dan Gereja Pentakosta Amerika dan Adven Hari Ketujuh dari daratan Eropa. Sejarah munculnya Gereja-gereja tak lepas dari reaksi Gereja Reformasi atas Gereja Katolik, kemudian dari perpecahan dalam Gereja Protestan sendiri. Jadi, gerakan ekumenis sebenarnya merupakan gerakan bertingkat, mulai dari gerakan persatuan Gereja-gereja sealiran dari induk yang sama dalam cabang besar Gereja Protestan dan kemudian gerakan ekumene antar-aliran-aliran besar. Potensi dan peluang mengembangkan gerakan ekumenis lebih mudah diwujudkan pada tingkatan aliran. Mengukur potensi gerakan ekumenis kiranya dimulai dari kelompok aliran itu, walaupun bisa terjadi bahwa keterlibatan ekumenis di luar kelompok aliran terjadi karena kebuntuan intern.

Kelompok aliran pertama yang ada di Papua ialah Gereja-gereja yang ada di bawah Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Tanah Papua.[2] Mereka adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI), Gereja Kristen Kalam Kudus Wilayah Papua (GKKK), Gereja Kristen Protestan Indonesia di Tanah Papua (GPI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Kemah Injili Indonesia (GKII), Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO), Gereja Pentakosta Pusat Surabaya (GPPS), Badan Pekerja Daerah Provinsi Papua Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Bethel Injil Sepenuh

[2]Di Indonesia terdapat 88 denominasi Gereja, tetapi 80 % di antaranya adalah umat Protestan.

(GBIS), Gereja Rehobot Indonesia, Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia di Tanah Papua (GSJA), Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia Wilayah Papua (GSJKI). Persekutuan ini memperlihatkan keragaman aliran. Di dalamnya terdapat Gereja warisan Belanda zaman VOC (Reformasi) yang beraliran Kalvinis, Gereja Metodist, Gereja Lutheran dari Jerman, Gereja Evangelist Amerika dan Gereja-gereja beraliran Pentakosta. Walaupun demikian, kesatuan ekumenis mereka dijamin oleh Dokumen Keesaan Kegerejaan yang memuat kesepakatan bersama. "Gereja-gereja berkomitmen untuk menyatakan satu Gereja yang esa di Indonesia. Keesaan itu ditunjukkan melalui kebersamaan dalam kesaksian dan pelayanan, persekutuan, saling menolong dan membantu"[3] tanpa bermaksud menyeragamkan Gereja-gereja di Indonesia. Ini adalah "suatu keesaan dalam tindakan, artinya keesaan yang makin lama makin bertumbuh dan berkembang ketika melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam visi dan misi bersama." Semua Gereja dan denominasi bisa menjadi pengurus PGI, sehingga secara struktural PGI menjaga wadah ekumenis ini. Sidang raya lima tahunan merupakan ajang menyatukan pemahaman dan komitmen bersama. Dalam dokumen bersama itu dirumuskan sikap ekumenis dengan aliran di luar PGI dan dengan agama lain (PTPB 2014-2019 no. 36), walaupun masih harus dicermati bobot komitmen dan luasnya keterbukaan tiap Gereja setelah kesepakatan itu dibawa dalam kehidupan intern masing-masing Gereja, terutama karena dokumen bersama nasional belum tentu mengikat gereja-gereja yang bergabung di PGI Wilayah Papua tetapi secara nasional tidak bergabung di PGI.

Kelompok kedua ialah Persekutuan Gereja Lembaga Injili di Indonesia (PGLII) wilayah Papua. Di dalamnya tergabung Persekutuan Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGP), Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Gereja Jemaat-Jemaat Protestan di Papua (GJDP), Gereja-Gereja Reformasi di Papua (GGRP), Gereja Kristen Nazarene (GKN) wilayah Tanah Papua, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI), Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Badan Pekerja Daerah Provinsi Papua Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA). Umumnya, dalam kelompok ini tergabung kelompok Evangelist, Baptis dan Pentakosta. PGLII di Indonesia, yang beranggotakan 96 Gereja, merupakan perpanjang-an lembaga ekumenis *World Evangelical Alliance* (WEA).

[3]Lihat https://pgi.or.id/sejarah-singkat. Bdk. Dokumen Keesaan 2014-2019, no. 20, 39, 47; bdk. PTPB no. 25-36.

Kelompok Gereja Injili bervariasi, muncul dari pembaharuan demi pembaharuan yang semuanya memakai sebutan *evangelist*. Mereka adalah koalisi pelbagai aliran yang membentuk gerakan injili. Mereka disatukan oleh musuh bersama yaitu teologi liberal, aksi sosial, dan kekacauan akibat arus Pencerahan (Aritonang, 2005), Romanisme (Roma Katolik), dan kekafiran (Bassett, 2002). Mereka bervariasi dalam tafsiran tentang Injil sosial, keterlibatan politik, peran teologi, dogma dan kesucian, serta keselamatan (pribadi atau bersama), hubungan antara evangelisasi dan aksi sosial Gereja (Bassett, 2002). Pokok-pokok dasar keyakinan dan ajaran kaum Evangelist sebenarnya tidak beda jauh dari Gereja-gereja arus utama. Hal yang membedakan mereka adalah gaya penyampaian, penekanan, dan penafsiran. Oleh karena itu, pada dasarnya mereka tidak mengalami kendala bila mereka bergabung dengan Gereja Evangelis lain atau Gereja Protestan arus utama yang juga memberi tempat utama pada Injil.

Pergumulan ekumenis antar-Gereja dalam kelompok ini belum selesai, karena ke dalam aliran ini sudah bergabung orang berpendidikan tinggi yang memadukan Injil dengan ilmu pengetahuan dan turunannya. Alhasil muncul sayap baru *New Evangelical* yang ingin kembali ke semangat awal, walaupun harus menghadapi tantangan dari gerakan kaum Evangelist sendiri untuk memberi perhatian kepada masalah-masalah sosial (Aritonang, 2005). Dari sejarah perkembangan ini tampak bahwa, di satu pihak, gerakan ekumene dalam kelompok aliran ini sebenarnya tidak sulit karena memiliki motivasi dan keyakinan yang sama. Di lain pihak, masih tetap terbuka untuk memisahkan diri dari yang lain.

Sikap dasar ekumenis terhadap Gereja lain, seperti Katolik dan badan ekumenis lain sebenarnya tidak berbeda dari pergumulan internal mereka. Mereka bangga menjadi orang yang paling setia terhadap Injil Kristus dan akan menjauhkan diri dari kelompok yang kompromistis (Armstrong, 2014). Terhadap badan ekumenis WCC mereka keluar-masuk karena isu dominasi aksi sosial atas penginjilan; dogma yang dilembagakan (otoritas Gereja) diutamakan dari pengalaman pribadi. Gerakan baru kelompok Injili di Chicago tahun 1970-an menantang pendapat yang ekstrim dan menawarkan bentuk penghayatan baru, yang kemudian bisa mendekatkan mereka dengan Badan Ekumenis lain dan Katolik Roma (Aritonang, 2005).

Sejak 1980, Gereja Katolik Roma memulai dialog dengan WEF yang berlanjut dengan pelbagai pertemuan dalam badan khusus *Christian World Communion* tahun 1988 dan 1990, 1993. Walaupun masih ada ketegangan (seperti masalah penginjilan dan proselitisme) di tingkat regional, kedua badan itu bisa menghasilkan deklarasi bersama *Evangelicals and Catholics*

Together: The Christian Mission in the Third Millennium (1994) yang berfokus pada bidang-bidang yang konvergens. Sayang bahwa sesudah tahun 2000 terjadi *setback* dalam relasi keduanya (Vandervelde, 2002).

Di Indonesia, antara Badan Ekumenis PGI dan PGLII tidak ditonjolkan perbedaan tetapi corak bersama, yaitu corak Injili kedua badan ini, sehingga sesuai dengan corak Asia, bahkan Gereja Injili bergabung dalam kedua badan ini. Dalam perjumpaan yang intens antara Gereja-gereja di Papua tampak perbedaan fokus yang pernah ada dalam pertikaian sejarah sebelumnya. Gereja-gereja Injili yang menekankan Papua Tanah Injil (menjadikan Injil di atas segalanya) dan kesucian pribadi (puasa, kebangunan rohani, dan doa), lepas dari aksi sosial, kadang berseberangan dengan Gereja lain yang menekankan Papua Tanah Damai dan kesucian sosial melalui pengembangan masyarakat yang lebih Injili.

Kelompok aliran ketiga ialah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta (PGPI) Provinsi Papua. Tergabung dalam kelompok ini adalah Gereja beraliran Pentakosta, yaitu Sinode Gereja Bethel Gereja Pentakosta (GBGP), Sinode Gereja Pentakosta di Tanah Papua (GPDP), Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Badan Pengurus Daerah Gereja Pentakosta Pusat Surabaya (GPPS), Badan Pengurus Daerah Gereja Pentakosta Internasional Indonesia (GPII), Badan Pengurus Daerah Gereja Pentakosta Tabernakel (GPT), Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Tabernakel, Badan Pengurus Daerah Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia (GPSDI), Badan Pengurus Daerah Gereja Pentakosta Haleluyah Indonesia (GPHI), Badan Pengurus Daerah Gereja Kristus Pentakosta Misi Indonesia (GKPMI), Badan Pengurus Daerah Gereja Pentakosta Indonesia (GPI), Sinode Gereja Misi Kristus Papua (GMKP), Badan Pengurus Daerah Gereja Segala Bangsa, Badan Pengurus Daerah Gereja Kerapatan Pentakosta (GKP), Badan Pengurus Daerah Gereja Penyebaran Injil (GPI), Badan Pengurus Daerah Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), Badan Pekerja Daerah Provinsi Papua Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Sidang Jemaat Kristus (GSJK) Wilayah Papua, Badan Pekerja Daerah Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI)

Kesatuan Gereja-gereja ini diikat oleh satu semangat pembaruan yang muncul dari Baptisan Roh Kudus. Pembaruan ini kemudian berkembang sejalan dengan Gerakan Kesucian dan Kebangunan Rohani memperjuangkan kesempurnaan hidup di Amerika Serikat di kalangan Metodis. Munculnya gerakan ini tidak pertama-tama untuk membentuk Gereja tetapi untuk memberi bobot hidup kekristenan pada orang-orang Kristen yang ada di Gereja-gereja yang sudah ada. Artinya, sebenarnya dalam Gerakan ini sudah terdapat penganut dari pelbagai Gereja sampai

akhirnya munculnya Gereja tersendiri. Mereka tak terlalu memberi perhatian pada teologi atau ajaran tetapi pada kehidupan suci dan pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Struktur Gereja minimal, semangat misioner, kesederhanaan ajaran, keterbukaan pada yang "supernatural", kelenturan pada budaya, konotasi emosional yang kuat dan kemampuan menciptakan pengalaman religius, membuat Gereja ini berkembang lebih bebas (Gomez, 2019). Gereja Pentakosta berkembang menjadi pelbagai Gereja, yang tidak dilihat sebagai perpecahan tetapi sebagai karya Roh (Aritonang, 2005). Dengan kebebasan menafsirkan sendiri Kitab Suci dan ajaran, didukung oleh prestise suku atau perorangan, ketegangan tentang harta milik, Gereja Pentakosta gampang berkembang biak dan pecah.

Dalam suasana itu, mereka terlibat dalam gerakan ekumenis, baik ke persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI) dan *Pentecostal World Conference* (PWC) maupun ke badan ekumenis lainnya, termasuk dengan Gereja Katolik Roma. Penganut aliran ini umumnya memusuhi gerakan ekumenis yang mereka anggap sebagai usaha untuk menobatkan orang dan mencapnya sebagai usaha manusia untuk menata kesatuan institusional (Hocken, 2002). Walaupun demikian, mereka sudah mulai terlibat dalam gerakan ekumenis, seperti dalam rangkaian pertemuan bilateral dengan Gereja Reformasi yang kemudian menghasilkan dokumen bersama dengan *Word and Spirit, Church and World* (1996-2000). Di Indonesia dan di Papua beberapa Gereja Pentakosta bahkan bergabung di tiga badan ekumenis sekaligus demi memperlihatkan semangat ekumene itu dalam catatan Seminar Hari Kedua (PGGP, 2016).

Dengan Gereja Katolik Roma dialog sudah dirintis sejak Konsili Vatikan II di mana wakil dari Pentakosta ikut sebagai pengamat. Sejak itu terdapat pelbagai rangkaian dialog antara Pentakosta dan Katolik dalam pelbagai isu. Dalam kehidupan jemaat, kelompok Pentakosta bergaul dekat dengan kelompok kharismatik dalam Gereja Katolik. Kelompok Pentakosta tak terlalu memperhatikan Gereja asal selain kesatuan rohani dalam urapan Roh Kudus. Walaupun demikian, Katolik dan Pentakosta belum saling yakin dan berhati-hati satu sama lain. Pentakosta sulit mengakui nilai keselamatan dalam Gereja Katolik dan sakramennya, sementara Gereja Katolik curiga atas penyebaran intervensi ilahi dan mengganggap janji-janji penyembuhan, ramalan, dan karunia rohani sebagai bentuk proselit (Gomez, 2019), yang di Papua sering dikritik sebagai "pencuri domba", tanpa harus mencari daerah misi yang baru.

Di Papua terdapat Gereja Advent Hari Ketujuh yang berdiri sendiri. Gereja ini muncul dari aliran mileniarisme yang menekankan kedatangan Kristus yang kedua. Walaupun ia bukan anggota badan ekumenis yang

terstruktur, ia mengakui Gereja-gereja yang mengangkat Yesus Kristus sebagai bagian dari rencana Allah untuk penginjilan dunia dan menghargai teman Kristen yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus (Beach, 2002). Mereka sendiri secara pribadi ikut dalam WCC sebagai pengamat dan penasihat, anggota dari komisi *Faith and Order*. Di Papua Gereja ini terlibat sebagai simpatisan atau pengamat dalam badan ekumenis Papua, PGGP.

Peran Gereja Katolik di Papua tampak sangat diperhitungkan dalam gerakan ekumene. Bukan hanya karena jumlah umat yang besar atau karena selalu dianggap "saudara sulung" oleh Gereja lain, tetapi terutama karena keterbukaan dan sikap proaktif keuskupan untuk memulai dan terlibat dalam pertemuan ekumenis, bahkan untuk pertemuan yang memuat memori negatif bagi Gereja Katolik (misalnya Peringatan 500 tahun Reformasi tahun 2016). Secara universal hal itu ditunjukkan dalam dokumen resmi *Unitatis Reintegratio* yang mengikat semua umat Katolik di seluruh dunia. Setelah disampaikan dasar teologis dan prinsip dasar berekumene, Konsili Vatikan II mendorong gerakan ekumenis, 'kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha, yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen'.

> "Pertama, semua daya-upaya untuk menghindari kata-kata, penilai-an-penilaian serta tindakan-tindakan, yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, dan karena itu mempersulit hubungan-hubungan dengan mereka. Kemudian, dalam pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai Gereja atau Jemaat, yang diselenggarakan dalam suasana religius, dialog antara para pakar yang kaya informasi, yang memberi ruang kepada masing-masing peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya, dan dengan jelas menyajikan corak-cirinya. … Begitu pula persekutuan-persekutuan itu menggalang kerja sama yang lebih luas lingkupnya dalam aneka usaha demi kesejahteraan umum menurut tuntutan setiap suara hati Kristen; dan bila mungkin mereka bertemu dalam doa sehati sejiwa. Akhirnya mereka semua mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai Gereja, dan sebagaimana harusnya menjalankan dengan tekun usaha pembaharuan dan reformasi" (UR no. 4).

Atas dasar ini Konferensi para Uskup di Indonesia membentuk satu komisi untuk hubungan antarumat beragama, termasuk hubungan dengan Gereja lain, baik di tingkat nasional maupun keuskupan, bahkan untuk beberapa tempat, di tingkat paroki. Gereja Katolik di Indonesia kiranya mengerti *being catholic as being ecumenically catholic*. Hal ini disadari sepenuhnya

oleh Gereja Katolik Papua, di mana terdapat begitu banyak aliran Gereja lebih dari daerah lain di Indonesia. Seperti sudah disinggung di atas, Gereja Katolik (Keuskupan Jayapura) memprakarsai pendirian lembaga ekumenis Papua, Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) yang sekarang terdiri dari 48 Gereja dan denominasi dari semua aliran besar di atas.

Tantangan dan Peluang

Gerakan ekumenis di Papua barangkali masih muda dan masih mencari bentuk yang pas. Sebagai suatu langkah awal, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dibenahi demi suatu gerakan ekumenis yang menjanjikan. Dalam pelbagai momentum ekumenis sudah terasa pelbagai tantangan nyata yang memerlukan jalan keluar ekumenis.

Tidak bisa disangkal bahwa Gereja-gereja datang ke Papua bukan sebagai satu Gereja dengan satu tradisi dan ajaran, bahkan sebaliknya, bermusuhan satu sama lain. Gereja-gereja sudah membangun benteng bagi dirinya dengan tradisi, ajaran, ibadah, struktur, dan etika yang khas, dengan lebih menekankan apa yang membedakan dari yang lain daripada apa yang menyatukan. Sudah terbangun suatu tembok spiritual-teologis.

Selain perbedaan ajaran dan tradisi iman, hal yang perlu dicek dalam membangun ekumene adalah teologi ekumenis yang ada pada kelima aliran besar itu. Memasukkan teologi ekumenis dalam kurikulum teologi di STT sekurang-kurangnya memperlihatkan tanda positif dalam gerakan ekumenis. Walaupun demikian, masih harus dicek dalam teologi itu sejauh mana satu Gereja menilai agama dan Gereja lain, sejauh mana posisi dan fungsi tradisi, ajaran, liturgi dan struktur Gereja lain diakui sebagai media keselamatan? Label 'ekumenis' bisa diisi dengan pelbagai arti, tekanan dan tujuan yang berbeda menurut Gereja masing-masing. Gereja Katolik sebelum Vatikan II mengerti ekumene sebagai *"ecumenism of return",* ekumene untuk kembali kepada 'Gereja ibu', Gereja Katolik. Sesudah Vatikan II, paham itu berubah total dengan mengakui hal-hal yang sama yang ada pada Protestan dan Katolik, dan mengakui media keselamatan di Gereja lain. Walaupun demikian, pelbagai teologi ekumenis masih menyisakan begitu banyak konsep dan paham yang berbeda berkaitan dengan ajaran dan tradisi tertentu. Apa yang menarik dalam proses ekumenis sekarang ini ialah orang menerima Katolik sebagai Katolik, dan Protestan sebagai Protestan, menerima yang lain sejauh Gerejanya; suatu ekumene yang tidak dituntut persatuan dan keseragaman tetapi ekemene pluralis yang menerima keragaman ajaran dan tradisi.

Gerakan ekumene itu bukan perkara gampang, karena mempertahankan tradisi khas itu berarti siap menerima pengaruhnya dalam dinamika kegiatan ekumenis. Cara kerja Gereja Pentakosta yang mengandalkan gerak spontan Roh Kudus kadang terbawa dalam kehidupan organisasi ekumenis, yaitu tidak terbiasa dengan rencana kerja, tanpa program dan sistem kerja. Tidak adanya tradisi organisasi yang kuat seperti dalam Gereja asal dan struktur yang longgar akan berpengaruh pada disiplin dan komitmen kerja yang longgar pula. Hal ini mengurangi komitmen bersama dalam lembaga ekumenis. Alhasil orang mengatakan bahwa lembaga ekumenis hanya suatu bentuk *fellowship*, forum komunikasi, tanpa komitmen yang mengikat partisipan. Lembaga ekumenis hanya gerakan sesaat, seremonial, *"punctuational"* yang tidak memiliki program berkelanjutan (Root, 2018), atau justru ada yang memanfaatkan lembaga itu untuk kepentingan Gereja masing-masing (PGGP, 2016).

Pada Hari Pekhabaran Injil ke-162 Gereja-gereja di Papua sepakat bahwa selain membangun teologi ekumenis, peluang ekumene akan tercapai lebih mudah melalui etika dan aksi sosial bersama (PGGP, 2016). Pengalaman terbentuknya PGGP menegaskan bahwa konsern bersama pada masalah sosial akan lebih mudah menyatukan Gereja-gereja. Pengalaman yang sama dari sejarah ekumene di Asia Selatan, India, (Athyal, 2017) memberi kesaksikan bahwa keprihatian yang sama di bidang sosial memberi dasar dari muncul dan kelangsungan kesatuan Gereja-gereja, bukan dari tembok teologis dan struktur kegerejaan yang selalu mendapat jalan buntu, melainkan dari tuntutan kemanusiaan universallah gerakan ekumene berkembang. Hanya, kemudahan ini tidak boleh dianggap remeh karena di sana juga tersembunyi ancaman yang memecahkan bila isu sosial itu tak diolah dengan baik. Ketika isu sosial diolah dalam rangka iman dan jatuh pada ideologi keagamaan yang mengikat Gereja tertentu, maka bukan kesatuan yang terjadi tetapi pertentangan ideologis. Itulah yang terjadi dalam ekumene Papua ketika muncul Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua dari kelompok Baptis, Kingmi, dan GIDI sebagai 'tandingan' PGGP. Perbedaan komitmen atas perjuangan Papua menjadi alasan pemisahan mereka.[4]

Dari tembok pemisah spiritual-teologis ini, selanjutnya terbangun pula tembok psikologis dan tembok sosial, yang didukung oleh identitas

[4]Untuk masalah Papua, wakil-wakil dari ketiga Gereja itu selalu membuat surat pastoral sendiri (Lihat Surat-Surat Gembala, 2018). Forum kerja ini tidak dianggap sebagai bagian dari unit kerja PGGP karena dalam menanggapi isu Papua mereka mengambil inisiatif, proses, dan disposisi sendiri, terlepas dari PGGP.

pembeda lainnya, menurut suku dan wilayah (karena aturan pemerintah Belanda dan kesepakatan para *zendeling* sendiri). Athyal menegaskan dalam menyimak ekumene di Asia Selatan bahwa ekumene tidak hanya menyangkut entitas teologis kegerejaan, tetapi juga identitas sosial (Athyal, 2017). Penyebaran menurut tradisi sendiri di wilayah yang tertutup bagi Gereja lain dapat membangun kehidupan yang monokultur, yang alergi atau belum terbiasa dengan keberagaman. Ketertutupan seperti ini membuat tembok spiritual, psikologis dan sosiologis di atas semakin kokoh dan mengawetkan pelbagai prasangka. Sejarah penyebaran Gereja di Papua ditandai oleh gejala ini, baik karena sistem *zending* maupun karena identifikasi tertutup Gereja tertentu dengan suku atau wilayah tertentu.

Klaim identifikasi suku dengan agama dan larangan bagi Gereja lain untuk ada, atau untuk mendirikan gedung gereja di wilayahnya, membuat pembauran, sebagai awal gerakan ekumene tak terjadi, atau malah membuat masyarakat kaku dan tak siap menghadapi orang di luar kelompok (agama)-nya. Michael Root mengatakan bahwa di Barat (Eropa) gejala ini mulai longgar. Identifikasi konvesional dengan negara atau wilayah tertentu semakin kurang karena gerakan globalisme, pembauran, karena imigrasi dan teknologi komunikasi yang menembus batas-batas kelompok (Root, 2018). Gerakan ini di Papua masih baru.

Tembok suku yang dibongkar oleh pemekaran wilayah dan pembangunan, didukung oleh komunikasi yang semakin canggih; suatu perkembangan pembauran yang tak dapat dihindar. Efek pembauran ini tidak serta-merta menghasilkan kesadaran ekumenis, karena bila pembauran ini menghasilkan marginalisasi kelompok tertentu, khususnya yang tak kuat bersaing di ruang publik, maka ketertutupan baru akan muncul dengan label baru 'politik identitas'. Hal itu semakin kuat menandai gerakan ekumenis, mulai dari identifikasi Papua Tanah Injil, untuk membedakan diri dari orang non-Papua yang umumnya beragama Islam, sampai pada identifikasi 'agama orang gunung' dengan agama Kingmi, GIDI, Baptis dan 'agama pantai' untuk GKI dan Gereja Pentakosta yang umumnya berkembang di perkotaan di pantai utara Papua. Bila sentimen konvesional kesukuan ini berkembang bersama dengan isu ideologis kedaerahan maka akan semakin kental tantangan ekumene di Papua. Yang diperlukan dalam situasi ini ialah kelihaian mengolah keragaman yang multi-dimensional agar keragaman itu dapat menjadi sumber kerekatan ekumenis yang memperkaya.

Ketertutupan seperti ini semakin kuat ketika Gereja menemukan kenyamanan dalam kehidupan beragama. Sesuai kecondongan dasarnya, orang tidak gampang keluar dari zona aman. Ia tak gampang begitu saja ikut dalam wilayah di mana keyakinan (termasuk teologi) dan dirinya diperta-

nyakan ulang, dirombak, dan disusun ulang. Hanya dalam suatu kejadian kritis orang terpaksa masuk dalam wilayah batas, wilayah transisi; apalagi kalau ia harus memasuki lingkungan di mana ia tak kuat bersaing. Kecenderungan ini akan semakin kuat bila ketertutupan ini ditanam kuat dalam membangun teologi, tradisi, dan sistem pengetahuan dan keyakinannya. Apa yang terjadi adalah agama atau Gereja lain dipandang sebagai barang asing yang mengganggu kenyamanannya dan karena itu tidak akan menjadi faktor pemerkaya kehidupan imannya. Katakan saja bahwa hubungan dengan Gereja lain (ekumene) dihayati sejauh perlu, bukan fokus, tetapi sebagai taktik dan tuntutan kehidupan sosial belaka. Tidak semua STT memiliki mata kuliah ekumene dan tidak semua Gereja memiliki komisi atau divisi ekumene (dialog dan ekumene) dalam struktur kegerejaannya.

Gerakan Ekumene di Papua memang baru dimulai. Seruan untuk bersatu, berjalan bersama dari semua Gereja semakin sering kedengaran dalam setiap pertemuan. Pertemuan ekumenis semakin banyak dihadiri. Hal yang mengikat semua Gereja adalah kesadaran sebagai sesama orang Kristen yang hidup berdasarkan Injil dan yang percaya kepada Kristus. Semangat yang sama ini diperkuat oleh ikatan budaya Papua yang sama dengan keprihatinan sosial yang sama-sama dihadapi, yaitu radikalisme agama dan marginalisasi masyarakat Papua. Gereja-gereja mulai keluar dari *getho* dan mulai belajar dari Gereja lain (Tveit, 2017).

Antusiasme awal ini diharapkan tak akan cepat jatuh pada *ecumenical winter* atau hanya menjadi *punctuational movement*. Sudah saatnya antusiasme tersebut diberi dasar yang kuat dengan teologi ekumenis, yang pada gilirannya menurunkan pedoman-pedoman ekumenis bersama. Gerakan *unofficial ecumenism* perlu semakin dikembangkan dengan melibatkan mahasiswa dan awam, tanpa selalu bersandar pada pemimpin Gereja. Pada saat yang sama, gerakan ekumenis bilateral dimajukan agar tidak hanya bergantung pada cita-cita ideal (kesatuan seluruh Gereja), yang tak selamanya berjalan mulus. Proses itu tidak bisa mengidealkan kesatuan, apalagi keseragaman. Gerakan ekumenis menuntut juga kesediaan untuk menerima kemungkinan adanya konflik dan kesiapan untuk mengolah konflik secara lebih matang (Brown, 2017). Di situ akan muncul spiritualitas ekumenis dan keutamaan-keutamaan Kristen yang akan memperkaya kehidupan kristiani.

Daftar Rujukan

Alua, A. A. 2006. *Permulaan Pekabaran Injil di Lembah Balim.* Abepura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

Aritonang, J. S. 2005. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Aritonang, J. S. *(rev)*. 2016. *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Armstrong, J. H. 2014. "The Emmerging Face of Being One: Ecumenical Windows for Evangelicals," dalam *Journal of Ecumenical Studies, 49:2,* Spring 2014.

Athyal, J. M. 2017. "The South Asian Presence in the Ecumenical Movement," dalam *The Ecumenical Review,* Volume 69, Number 4, December 2017, halaman 557-569.

Bassett, P. M. 2002. "Evanglicals," dalam N. Lossky, *Dictionary of Ecumenical Movement*, halaman 443-445. Geneva: WCC Publications.

Beach, B. B. 2002. "Seventh-Day Adventist Church," dalam N. Tossky, *Dictionary of the Ecmenical Movement*, halaman 1035-1036. Geneva: WCC Publications.

Berg, L. v. 1974. "Sejarah Gereja Katolik di Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Manokwari," dalam Dokumrn KWI, *Sejarah Katolik Indonesia, Jilid 3A*, halaman 663-714. Jakarta: KWI.

Brown, S. G. 2017. "Ecumenical Utopia: An Impossible Dream?" dalam *The Ecumenical Review,* 69/1, halaman 34-44.

Castro, E. 2002. "Evangelism," dalam N. Lossky, *Dictionary of Ecumenical Movement*, halaman 445-453. Geneva: WCC Publications.

Desa, H. 2019. *Ekumene di Papua* (Catatan interview K. Bahang, 10 Maret 2019).

Gomez, J. U. 2019. *Catholic and Pentecostals: an historical overview*. Retrieved from Vatican Official Website: http://www.vatican.va. Diunduh pada 24 Maret 2019.

Hayward, D. 1980. *The Dani of Irian Jaya. Before and After Conversion.* Sentani: Region Press.

Hocken, P. 2002. "Pentecostals," dalam N. Lossky, *Dictionary of the Ecumenical Movement*, halaman 900-902. Geneva: WCC Publications.

Kärkkäinen, V. M. 2000. "Truth on Fire: Pentecostal Theology of Mission and the Challenges of a New Millenium," dalam *Asian Journal of Pentecostal Studies 3/1*, halaman 33-60.

Karubaba, I. 2018. "Sejarah Singkat Gerakan Pentakosta menem-bus Tanah Papua," dalam *Lintas Papua,* https://lintaspapua.com/2018/10/17/. Diunduh pada 17 Oktober 2018.

Ladouceur, P. 2017. "Living Ecumenism: Margaret O'Gara's Ecumenical Ecclesiology," dalam *Journal of Ecumenical Studies, 5/2*, halaman 402-420.

Latuputy, S. 2017. "Transformasi Penginjilan dan Gerakan Ekumenis," dalam *Injil Sumber Tanah Damai*, halaman 134-154. Jayapura: PGGP.

Mawene, M. T. 2017. "Perkembangan Lanjut Reformasi Gereja sampai Munculnya Sekte-Sekte dan Denominasi-Denominasi Gereja," dalam *Gereja-Gereja Harus Membaharui Diri dan Bersatu*, halaman 66-71. Jayapura: PGGP.

Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP). 2005. *Papua Tanah Damai.* Jayapura: PGGP.

_____. 2015. *Pedoman Dasar Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua.* Jayapura: PGGP.

_____. 2016. "Deklarasi dan Rekomendasi HPI 162," dalam *Injil Sumber Papua Tanah Damai*, halaman 10-22. Jayapura: PGGP.

_____. 2016. *Injil Sumber Papua Tanah Damai.* Jayapura: PGGP.

_____. 2016. "Seminar Hari Kedua," dalam *Gereja-Gereja Harus Memperharui Diri dan Bersatu*, halaman 55-153. Jayapura: PGGP.

Root, M. 2018. "Ecumenical Winter," dalam *First Things*, October 2018, halaman 33-39.

Saud, H. 2016. "Gereja-Gereja Anggota PGI di Indonesia," dalam *Gereja-Gereja Harus Membaharui Diri dan Bersatu*, halaman 81-100. Jayapura: PGGP.

Saud, H. 2019. Sejarah Gerakan Ekumenis di Papua. (Catatan interview K. Bahang, 8 Maret 2019).

Giyai, Benny *(ed).* 2018. *Surat-surat Gembala.* Abepura: Deiyai.

Tebay, Y. 2010. *Sejarah Gereja Kingmi di Tanah Papua.* Abepura: Deiyai.

van den End, Th. dan J. Weitjens. 1993. *Ragi Carita 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Tveit, O. F. 2017. "Reformation and Mutual Accountability," dalam *The Ecumenical Review, 69/2*, halaman 152-163.

Umbora, J. 2016. "Sejarah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh," dalam *Gereja-Gereja Harus Memperbaharui Diri dan Bersatu*, halaman 109-129. Jayapura: PGGP.

Vandervelde, G. 2002. "Evangelical - Roman Catholic Relations," dalam N. Lossky, *Dictionary of the Ecumenical Movement*, halaman 440-443. Geneva: WCC Publications.